

## KEMISKINAN DI INDONESIA (FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSINYA)

**Emiraldo Win Pazqara**

Email: *emiraldovdh@gmail.com*

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wijayakusuma Purwokerto

### ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk melihat fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang secara notabene juga melanda beberapa negara di wilayah Asia dan juga Afrika. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasi bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan di Indonesia diantaranya: pertama, dari aspek produktivitas masyarakat yang dilihat dari rendahnya kualitas SDM sehingga tidak berdaya saing. Kedua, dari aspek faktor budaya, terlihat dari perilaku masyarakat yang tidak mau berusaha dan cenderung pasrah serta malas. Ketiga, dari aspek ketidakmerataan pembangunan, dimana pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah Jawa sehingga berimbas pada ketertinggalan di wilayah luar Jawa. Adapun mengenai solusi untuk kemiskinan ini diantaranya adalah pertama, yakni menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Kedua, mewujudkan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu berdaya saing. Ketiga, melakukan pemberantasan korupsi. Keempat, melakukan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

**Kata Kunci: Kemiskinan, Faktor Penyebab, Solusi**

### A. PENDAHULUAN

Mengatasi masalah kemiskinan tak ubahnya seperti menegakkan benang basah, yang cenderung sulit untuk dilakukan. Sudah banyak teori-teori dan konsep-konsep berkenaan dengan cara untuk menanggulangi kemiskinan, namun kenyataannya sampai dengan sekarang kemiskinan masih tetap menjadi misteri yang entah sampai kapan bisa ditanggulangi.

Negara-negara di wilayah Asia dan Afrika yang notabene merupakan negara berkembang kerap kali menjadi obyek bahasan dan penelitian oleh para pakar pembangunan mengenai konsep pembangunan yang dijalankan di negara-negara tersebut, terutama yang dikaji adalah aspek kemiskinannya yang cenderung dianggap sebagai penghambat pembangunan. Bahkan fenomena kemiskinan di negara-negara berkembang ini sudah lama menjadi pusan permasalahan sehingga membutuhkan suatu metode tertentu untuk menanggulangnya.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sudah sejak lama berkuat dengan masalah kemiskinan. Pembangunan yang sudah sejak lama dijalankan cenderung berbanding lurus dengan semakin meningkatnya jumlah angka kemiskinan dari tahun ke tahun dan semakin diperparah pasca Indonesia dilanda krisis ekonomi dimana tingkat kemiskinan melejit tinggi sampai dengan 19,9 persen di akhir tahun 1998 (Indonesia investment : 2017).

Semenjak Negara Indonesia berdiri, pada dasarnya upaya penanggulangan kemiskinan pernah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan. Situs Indonesia Investment (2017) menulis bahwa antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada di bawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis baik di desa maupun di kota karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis

kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja.

Prestasi dalam hal menekan angka kemiskinan tersebut tentu diharapkan bisa terulang kembali di era reformasi ini, dimana kemakmuran dan pemerataan masih belum menjadi konsep yang usang ditelan zaman sampai dengan sekarang. Harapan tersebut tentu harus dilandasi itikad baik dan *political will* dari pemerintah dan didukung semua kalangan sehingga tidak hanya menjadi sekedar wacana dan retorika semata.

Penanganan berbagai masalah kemiskinan tentunya memerlukan strategi penanggulangan yang cukup jelas. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya diharapkan memiliki strategi yang cukup komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan adalah menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, dan langkah berikutnya adalah pelaksanaan yang konsisten. Pada tahap kedua inilah pemerintah - pemerintah daerah sering mengalami kegagalan (Alvian Firmansyah : 2005). Maka dari itu diharapkan pemerintah diharapkan bisa memilah dan memilih strategi yang pas dan berkaca dari kegagalan-kegagalan yang terjadi sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berjudul Kemiskinan di Indonesia, Faktor-Faktor Penyebab dan Solusinya.

## B. METODE PENULISAN

Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik peneliti (Mulyana, 2003:145). Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis dokumen. Dokumen yang dimanfaatkan adalah buku, koran, jurnal, dan sumber-sumber lainnya.

## C. PEMBAHASAN

### a. Konsep Dasar Kemiskinan

Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Wikipedia, dalam landasanteori.com). Untuk memberi pemahaman konseptual, pada dasarnya ada dua pengertian kemiskinan, yaitu:

1. Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan
2. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda” (Mardimin, 1996:20)

Terkait dengan jenis-jenis kemiskinan, Mardimin (1996 : 24) mengkategorikan menjadi lima jenis, yakni diantaranya:

1. Kemiskinan absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien.
2. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah.
3. Kemiskinan Struktural. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.
4. Kemiskinan Situasional atau kemiskinan natural. Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah

yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.

5. Kemiskinan kultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin.

Menurut Manurung (dalam landasanteori.com), Ada faktor-faktor penyebab kemiskinan secara non manusia, diantaranya adalah:

- 1) Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit,
- 2) Keterampilan atau keterisolasi desa,
- 3) Sarana pehubungan tidak ada,
- 4) Kurang Fasilitasi umum,
- 5) Langkanya modal,
- 6) Tidak stabilnya harga hasil bumi,
- 7) Industrialisasi sangat minim
- 8) belum terjagkau media informasi,
- 9) Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa,
- 10) Kepemilikan tanah kurang pemerataan.

#### b. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (wikipedia).

Untuk menganalisis fenomena kemiskinan dalam perspekif negara berkembang seperti Indonesia, pertama hal ini dilihat pada kondisi sosial kemasyarakatannya, yang dikaitkan dengan teori behavioral yang berhubungan dengan tingkah laku individu, yaitu dari tingkat produktivitas masyarakat. Apabila melihat kondisi di Indonesia, tingkat produktivitas masyarakat cenderung rendah, hal ini diperkuat dengan rendahnya kualitas SDM yang

berbanding lurus dengan rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan sehingga tidak mempunyai nilai jual dan tidak berdaya saing. Contoh kasus adalah fenomena TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Secara teoritis kelihatannya positif, dalam arti dapat meningkatkan devisa negara, akan tetapi persoalannya tidak sesederhana itu, yang menjadi masalah adalah para TKI ini bekerja di luar negeri bukan karena mereka memiliki skill dan berdaya saing sehingga akan ditempatkan di pos-pos penting di luar negeri, akan tetapi mereka dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kasar, seperti pembantu rumah tangga, serta buruh tani dan bangunan, jadi dalam hal ini kuantitas lebih banyak berbicara dibandingkan kualitas, dan fenomena ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi citra negara Indonesia sebagai negara berkembang di mata dunia.

Terkait masalah produktivitas, kiranya tepat pandangan dari Dos Santos (Arief Budiman, 1995, 73) bahwa industri, dalam hal ini dapat dianalogikan sebagai negara, mengalami kesukaran dalam memasarkan barang-barangnya (dapat dianalogikan sebagai SDM) di dalam negeri, karena 3 hal; pertama, upah yang dibayarkan sangat murah. Hal ini karena rendahnya produktivitas SDM sehingga upah yang dibayarkan pun kecil, sehingga tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi pun rendah. Kedua, teknologi padat modal yang dipakai membuat jumlah pekerjaan yang diciptakan menjadi lebih sedikit. Efek industrialisasi di Indonesia yang mengutamakan kemajuan teknologi dan produktivitas tinggi serta cenderung bersifat mekanis mengakibatkan semakin tersingkirnya SDM yang *unskilled* dan tidak produktif sehingga berakibat terhadap semakin sempitnya lapangan kerja. Ketiga, larinya keuntungan ke luar negeri membuat mengeringnya modal

untuk membuat industri nasional sendiri. Inilah efek domino dari investasi asing, dimana negara bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengejar ketertinggalan dan supaya bisa bersaing dengan negara lain dengan cara mengadopsi teknologi dari luar karena tidak atau belum bisa mengusahakannya sendiri, maka dari itu keran industrialisasi dibuka selebar-lebarnya melalui investasi asing, yang artinya pembangunan ekonomi dalam negeri cenderung melibatkan campur tangan asing. Jadi, rendahnya tingkat kesejahteraan, tidak adanya *skill* sehingga cenderung gagap dalam menghadapi perubahan, dalam hal ini teknologi, serta semakin sempitnya lapangan pekerjaan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kemiskinan di Indonesia.

Kedua, apabila kita mencoba menganalisis dengan menggunakan teori budaya kemiskinan yang menyatakan bahwa tingkah laku dan budaya masyarakat kelas bawah, tercermin melalui sikap pasrah, malas, dan tidak ingin berinovasi atau melakukan perubahan untuk perbaikan hidup, tidak mau berusaha dan cenderung ingin meraih kesenangan hidup secara instan. Maka fenomena yang terjadi dapat dilihat dari semakin banyak dan deras arus urbanisasi dari desa ke kota karena adanya iming-iming penghasilan yang layak, namun arus urbanisasi ini tidak diimbangi dengan *skill* serta kemampuan yang memadai dari para urban sehingga mereka cenderung menjadi beban bagi pemerintah dan semakin sulit untuk tertanggulangi, jadi rendahnya *skill* yang merupakan implikasi dari budaya miskin berpengaruh bagi rendahnya tingkat produktifitas mereka, yang dapat dilihat dari profesi mereka yang kebanyakan menjadi pengemis, pengamen dan pekerjaan-pekerjaan

lain yang cenderung tidak bisa diambil sisi manfaatnya di bidang ekonomi.

Ketiga adalah struktur sosial, pembangunan yang cenderung tidak merata dan lebih terpusat di pulau Jawa, yang mengakibatkan ketertinggalan di luar Jawa dan berimbas kepada semakin tersentralisasinya akumulasi modal di pulau Jawa, sehingga berbanding lurus dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan. Jadi hal ini sesuai dengan pandangan Oscar Lewis (Sherraden, 2006) melalui perspektif situasi miskin, yang mengindikasikan bahwa disfungsi tingkah laku merupakan adaptasi fungsional terhadap keadaan-keadaan yang sulit, yang maksudnya adalah, bahwa kemiskinan disebabkan bukan karena perilaku, akan tetapi lebih pada kondisi situasi yang mengelilinginya. Fenomena ini juga bisa dikaji dengan menggunakan teori keterasingan dan hubungan kekuasaan dari Karl Marx (Franz Magnis Suseno, 95, 115). Contoh di Papua, dimana sebagian besar masyarakatnya miskin di tengah keberlimpahan sumber daya alam di wilayah mereka. Masyarakat Papua tidak pernah diberi kesempatan untuk mengelola sendiri kekayaan alam mereka. PT Freeport, yang memegang kendali pembangunan di Papua melalui industri ternyata tidak memberi kontribusi positif bagi perkembangan serta kemajuan di Papua. Monopoli pengelolaan sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat lokal ternyata semakin mempertajam konflik antara pengusaha dengan masyarakat lokal. Hal ini semakin diperparah dengan kerusakan lingkungan yang dihasilkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang cenderung berlebihan dan tidak mempertimbangkan aspek lingkungan. Jadi struktur sosial yang tidak harmonis berpengaruh besar terhadap tumbuhnya kemiskinan di negara berkembang, dan hal ini sesuai dengan

teori struktural yang menyatakan bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistematis menciptakan ketidaksamaan kesempatan, dan berkelanjutannya penindasan kelompok miskin oleh kelompok kapitalis.

#### c. Solusi Untuk Kemiskinan

Kemiskinan memang merupakan suatu fenomena dan masalah utama dalam pembangunan yang sampai kapanpun akan tetap ada. Sungguhpun begitu tidak berarti kemiskinan merupakan sindrom yang tidak dapat ditanggulangi. Menghilangkan sama sekali fenomena kemiskinan merupakan hal yang musykil, tetapi setidaknya angka kemiskinan dapat ditekan dan dikurangi.

Secara teoritis, kemiskinan dapat ditanggulangi melalui pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Surplus modal yang dihasilkan melalui pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan melalui alokasi atau investasi modal khusus untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Harrod dan Domar (dalam Arief Budiman) menekankan pentingnya tabungan dan investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Yang menjadi masalah adalah, bagaimana caranya memacu pertumbuhan ekonomi di tengah rendahnya tabungan dan investasi?

Melihat kondisi di Indonesia, langkah yang harus diambil adalah pertama, menciptakan iklim berusaha dan investasi yang kondusif. Kondisi lapangan di Indonesia dimana sering terjadi konflik, termasuk kondisi birokrasi yang terlalu sentralistik sehingga cenderung menyulitkan dalam pengurusan suatu perizinan usaha dan investasi. Oleh karena itu, sudah saatnya di Indonesia diterapkan suatu terobosan baru dalam hal pelayanan publik yang cepat dan efektif dalam penanganan masalah perizinan. Kemudian terkait dengan

konflik yang sering terjadi di daerah tertentu, harus ada penanganan khusus dari aparat untuk mengamankan situasi supaya kondusif, karena ada beberapa daerah rawan konflik yang kondisi daerahnya termasuk strategis dan menjanjikan untuk iklim usaha.

Kedua, mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Ditengah keberlimpahan sumber daya alam di Indonesia, dan banyaknya penduduk, hal ini seharusnya bisa menjadi aset bangsa sebagai instrumen pembangunan. Sudah saatnya menerapkan konsep *entrepreneurial* atau kewirausahaan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat memicu kreatifitas, inovasi, dan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam serta mengkonversikannya menjadi modal.

Ketiga, pemberantasan korupsi. Inilah penyakit yang sangat sulit untuk dihilangkan di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Korupsi, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh besar terhadap kemiskinan. Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu serta memberi efek jera, dilaksanakannya secara penuh akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga ada mekanisme kontrol, serta optimalisasi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi (KPK) diharapkan dapat setidaknya memperkecil budaya korupsi.

Keempat, pemerataan pembangunan. Pembangunan yang cenderung terpusat di daerah atau kawasan tertentu cenderung mematikan potensi-potensi ekonomi yang tidak terlihat di kawasan lain, sehingga sudah saatnya kebijakan pembangunan tidak lagi terpusat atau terkonsentrasi di kawasan tertentu. Banyak kawasan lain di Indonesia yang sebenarnya potensial dalam pertumbuhan ekonomi, contohnya Papua, dan daerah-daerah lain di wilayah timur Indonesia. Terkonsentrasinya pembangunan di wilayah barat

Indonesia berdampak pada kurang optimalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perimbangan pembangunan antara timur dan barat mutlak diwujudkan untuk memenuhi unsur keadilan, serta semakin optimalnya pertumbuhan ekonomi sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.

#### D. PENUTUP

Kemiskinan secara umum adalah suatu keadaan kekurangan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kualitas hidup termasuk tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Terkait dengan faktor penyebab kemiskinan di Indonesia diantaranya adalah pertama, rendahnya produktivitas masyarakat dilihat dari rendahnya kualitas SDM sehingga tidak berdaya saing. Kedua, dari aspek faktor budaya, terlihat dari perilaku masyarakat yang tidak mau berusaha dan cenderung pasrah serta malas. Ketiga, adalah faktor ketidakmerataan pembangunan, dimana pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah Jawa sehingga berimbas pada ketertinggalan di wilayah luar Jawa. Adapun mengenai solusi untuk kemiskinan di Indonesia ini diantaranya adalah pertama, yakni menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Kedua, mewujudkan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu berdaya saing. Ketiga, melakukan pemberantasan korupsi. Keempat, melakukan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia: Jakarta
- Mardimin, Yohannes, 1996, Kritis Proses Pembangunan di Indonesia, Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Mulyana, Deddy. 2006 Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Suseno, Karl Magnis, 1999, Pemikiran Karl Marx, Gramedia: Jakarta

Website:

<http://alvianfirman.blogspot.co.id/2015/04/definisi-kemiskinan-penyebab-dampak-dan.html> 28 Februari 2018

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301?> 28 Februari 2018

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pe-ngertian-kemiskinan-jenis-faktor.html> 28 Februari 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan> 28 Februari 2018